

BAB II

FINLANDIA DAN MASALAH KETIDAKADILAN GENDER

A. Hak Pilih Perempuan (*Women Suffrage*) sebagai Awal Mula Perwujudan Keadilan Gender di Finlandia

Perempuan Finlandia merupakan perempuan pertama di Eropa yang memperoleh hak untuk memilih dalam pemilihan umum pada tahun 1906. Di belahan dunia yang lain, perempuan di New Zealand sudah mendapatkan hak pilih pada tahun 1893, perempuan di Australia pada tahun 1902 dan di beberapa negara bagian Amerika Serikat bahkan perempuan sudah dapat menggunakan suaranya pada tahun 1890an. Akan tetapi, perempuan Finlandia merupakan perempuan pertama di dunia yang memiliki hak pilih penuh, di New Zealand, persyaratan untuk dapat memilih hanya terbatas untuk wanita kulit putih, sedangkan di Australia pelaksanaan pemilihan umum untuk perempuan baru benar-benar dilaksanakan pada tahun 1940an walaupun perempuan sudah mempunyai hak pilih sejak tahun 1902 (Kurki, 1986).

Walaupun secara fakta gerakan yang menuntut adanya hak pilih dimulai di pusat politik dan ideologi dunia, seperti London dan New York, akan tetapi aksi nyata dari gerakan ini justru pertama diimplementasikan oleh negara-negara peri-peri. Sebagai contoh, terlepas dari gencarnya gerakan perempuan menuntut hak pilih di Inggris, nyatanya, hak pilih bagi kaum perempuan baru benar-benar terealisasi setelah Perang Dunia I antara tahun 1918 dan 1928 (Myers, 2013).

Di hampir seluruh negara-negara Nordik, hak pilih pada awalnya diterapkan pada pemilihan lokal baru meningkat di tingkat nasional.

Opini tentang perlunya hak pilih universal untuk laki-laki dan perempuan mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-19. Di banyak negara, banyak perempuan mulai melakukan advokasi untuk menerima hak yang sama dengan laki-laki. Kesempatan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dianggap perlu demi tercapainya keadilan. Ketidakadilan dirasakan ketika negara menerima keuntungan ekonomi dari perempuan seperti perempuan yang harus tetap membayar pajak seperti halnya laki-laki, tetapi sebagai gantinya justru tidak memberikan perempuan hak apapun dalam bermasyarakat.

Di Finlandia, perempuan pertama kali mendapatkan hak pilih pada tahun 1906 dan sudah berlaku menyeluruh bagi seluruh perempuan dalam negeri. Pada tahun 1865, perempuan Finlandia sudah mendapatkan hak untuk memilih di tingkat pedesaan, sedangkan di tingkat perkotaan pada tahun 1873. Menurut Undang-undang perkotaan, perempuan yang belum menikah dan yang memiliki status janda tetap memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih. Peraturan ini kembali disahkan pada tahun 1917 dengan memasukkan hak pilih universal yang sama dan hak untuk mencalonkan diri bagi perempuan. Parlemen sebenarnya telah mengesahkan undang-undang yang sama pada awal tahun 1908 akan tetapi Tsar (Kepala Negara) tidak menyetujui pada saat itu (Kurki, 1986), Finlandia sendiri pada saat itu masih berada di bawah kekaisaran Rusia. Berikut ini adalah data yang menunjukkan pemilihan di beberapa negara Nordik.

Tabel 2.1. Implementasi Hak Pilih Universal di Pemilihan Umum Negara-Negara Nordik

Year	Right to vote in national elections		Right to vote in municipal elections	
	Women	Men	Woman	Men
1849		Denmark		
1857		Iceland		
1865				Denmark
1872				Iceland
1898		Norway		
1901				Norway
1906	Finland	Finland		
1907		Sweden		
1908			Denmark	
1909			Iceland	Sweden
1910			Norway	
1913	Norway, Iceland			
1915	Denmark			
1917			Finland	Finland
1918			Sweden	
1921	Sweden			

Sumber: Hannele Kurdi dalam Publications Of The Council For Gender Equality, 1/1986

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ternyata keberhasilan dari perempuan dan laki-laki Finlandia untuk memperoleh hak politik penuh secara berkelanjutan tidak terlepas dari adanya kesadaran gerakan perempuan serta gerakan pekerja yang menyerukan adanya keadilan. Gerakan perempuan di Finlandia bahkan gencar menyuarakan adanya hak memilih dan juga dipilih bagi kaum perempuan.

Gerakan perempuan pertama di Finlandia lahir pada akhir tahun 1800an. Pada saat itu, Finlandia merupakan negara yang mengurus kebutuhannya sendiri dan masih berada di bawah Grand Duchy Kekaisaran Rusia (Pietila, 2006). Pada waktu ini pula banyak pemberontakan nasional muncul di negara-negara Eropa, Revolusi Rusia juga mulai terdengar, dan banyak gerakan buruh dan juga partai politik modern yang mendapatkan dukungan di Finlandia hingga Finlandia menjadi negara yang merdeka.

Tahun 1899 menandai titik balik penting dalam sejarah Finlandia. Dari semua dominasi Kekaisaran Tsar Rusia, saat berlangsungnya abad ke-19, Finlandia diberikan keleluasaan untuk mengatur otonominya sendiri dan juga kebebasan dalam berpolitik. Namun, pada bulan Februari 1899 atau pada akhir abad ke-19, Rusia hendak mencabut kebebasan berpolitik dan otonomi daerah ini lewat Rusifikasi yang kemudian memicu perlawanan dari Finlandia, yang dimulai dari petisi dan kemudian memanas menjadi demonstrasi, perlawanan pasif, dan pada akhirnya perlawanan aktif (Blanc, 2015).

Beberapa pihak yang menentang Rusifikasi pada saat itu muncul dari Partai Buruh dan Partai Nasionalis Finlandia. Salah satu poin penting yang disampaikan keduanya adalah mengenai isu hak pilih, di mana baik itu perempuan dan laki-laki yang bekerja pada saat itu belum mempunyai hak pilih. Selanjutnya, Partai Nasionalis Finlandia lalu bekerja sama dengan salah satu gerakan perempuan yaitu Asosiasi Perempuan Finlandia (*Finland's Association of Women/Suomen Naisyhdistys*) untuk meminta adanya hak pilih bagi perempuan yang mempunyai jenis pekerjaan yang sama dengan laki-laki (Blanc, 2015).

Sebaliknya, Partai Buruh menuntut adanya hak pilih bagi seluruh rakyat dengan tidak pandang bulu, baik dari hal gender, pekerjaan, maupun kewarganegaraan (Blanc, 2015). Walaupun demikian, masih terdapat budaya patriarki di beberapa kalangan atas Finlandia yang menentang keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum. Hal inilah yang kemudian mulai memunculkan protes dari perempuan-perempuan lewat munculnya gerakan perempuan yang mempunyai fokus yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai

tujuan yang sama. Perlawanan Finlandia terhadap Rusifikasi juga terus berlanjut dan merupakan salah satu faktor yang memicu deklarasi kemerdekaan Finlandia pada tahun 1917.

Masalah Ketidakadilan Gender di Finlandia

Seiring dengan perjalanannya, Finlandia mempunyai sejarah yang unik dalam masalah ketidakadilan gender yang terjadi di negaranya. Sebagai bagian dari negara Swedia hingga akhirnya menjadi negara jajahan Rusia, kemerdekaan Finlandia sedikit banyak juga dipengaruhi oleh gerakan perempuan yang menuntut adanya kemerdekaan yang pada akhirnya berhasil diraih pada tanggal 6 Desember 1917 di mana pada tahun 1906 perempuan Finlandia sudah mendapatkan hak pilih. Pada saat itu, perempuan Finlandia dianggap sebagai pihak yang akan terus memperkenalkan budaya dan bahasa nasional (Khoreva, 2012).

Selama perjuangan meraih keadilan gender dan juga kemerdekaan negara, Finlandia merupakan negara yang miskin, di mana perikanan, kehutanan, dan agrikultur merupakan sumber utama dari pendapatan warga negaranya. Karena iklim yang juga tidak menentu, semua populasi Finlandia baik perempuan dan laki-laki usia kerja dituntut untuk bekerja dan tidak terbagi antara pekerjaan perempuan dan laki-laki. Keduanya saling membantu dan membutuhkan kontribusi satu sama lain (Khoreva, 2012).

Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, walaupun hak pilih sudah tercapai, dan laki-laki serta perempuan saling bekerja sama, ketidakadilan gender

masih saja terjadi dan memprihatinkan kaum perempuan Finlandia. Ketidakadilan gender yang terjadi inilah yang kemudian juga menjadikan gerakan kaum perempuan di Finlandia yang tergabung dalam *Coalition of Finnish Women's Associations* (NYTKIS) untuk menuntut adanya kesetaraan. Ketidakadilan gender yang masih terjadi di Finlandia, yaitu:

1. Bidang Politik

a) Ketidakadilan di Kehidupan Politik dan Publik

Dalam level partisipasi politik dan publik, perempuan Finlandia masih merasakan adanya ketidakadilan yang menghalangi mereka untuk aktif berpartisipasi. Perempuan juga masih menemukan kesulitan untuk mendapatkan promosi karir di sektor swasta. Sebagai contohnya, perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi masih sulit untuk mendapatkan posisi atas dalam pekerjaan. Hampir setengah dari mereka yang menerima gelar PhD adalah perempuan, akan tetapi, di kehidupan nyata perempuan-perempuan ini harus menghadapi masalah yang serius dikarenakan publik tidak menerima desertasi mereka. Proporsi perempuan yang duduk di posisi atas dalam pekerjaan masih terbilang sedikit (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

2. Bidang Ekonomi

a) Kesempatan Tidak Sama di Tempat Kerja

Ketidakadilan yang besar di tempat kerja masih dirasakan antara perempuan dan laki-laki di Finlandia. Ketidakadilan ini ditunjukkan dari

adanya perbedaan pendapatan berdasarkan jenis kelamin, pemisahan gender di tempat kerja dan jangka waktu tetap pekerjaan yang berfokus pada perempuan. Pertama, perempuan yang memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki ternyata masih mendapat pendapatan yang lebih rendah. Survei menunjukkan bahwa dari 100%, perempuan hanya mendapatkan gaji 80% dengan pekerjaan yang sama dengan laki-laki.

Kedua, pemisahan gender di tempat kerja begitu tampak terjadi di wilayah kerja Finlandia. Terdapat perbedaan fokus laki-laki dan fokus perempuan yang mana fokus perempuan juga lebih sedikit dibandingkan dengan fokus laki-laki. Ranah teknologi contohnya masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan lebih sering menjumpai kesulitan untuk dipromosikan di pekerjaan walaupun jauh lebih tereduksi dibandingkan dengan laki-laki. Pada umumnya di Finlandia pekerjaan yang diselesaikan perempuan tidak lebih dihargai seperti yang diselesaikan oleh laki-laki.

Ketiga, jangka waktu tetap pekerjaan (*fixed-term employment*) di antara perempuan masih juga merupakan masalah di Finlandia. Jangka waktu tetap pekerjaan ini memberatkan perempuan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor lainnya. Masalah ini terutama merugikan perempuan-perempuan yang berada di masa subur mereka. Perempuan harus membayar mahal untuk mendapatkan cuti melahirkan dan merawat anak. Dikarenakan cuti melahirkan banyak digunakan oleh perempuan, biaya akhir juga akan jatuh ke tangan perempuan. Hal ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pekerjaan perempuan-perempuan di Finlandia karena perusahaan-perusahaan tidak mau

mengambil resiko untuk merekrut perempuan dan menghindari perempuan untuk mendapatkan posisi tetap dalam suatu pekerjaan.

3. Bidang Sosial

a) Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kekerasan yang paling berat yang terjadi di Finlandia. Kekerasan juga merupakan masalah yang tidak terlalu diperhatikan dalam kebijakan pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 membuktikan bahwa sejak tujuh tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan tidak berkurang dari tahun 1998. Pihak dari CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) bahkan sudah memberikan penekanan terhadap Pemerintah Finlandia untuk mengambil tindakan dalam melawan hal ini. Pemerintah diminta untuk meningkatkan kewajiban negara dengan membuat hukum dan juga melindungi korban untuk melawan segala tindakan kekerasan terhadap perempuan (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

Satu dari perempuan Finlandia pernah mengalami pelecehan seksual. Kekerasan seksual ini termasuk di dalamnya adalah candaan yang tidak senonoh, komentar-komentar tidak pantas, pendekatan fisik, maupun paksaan dalam melakukan hubungan seks. Polisi Finlandia mengestimasi bahwa setiap tahun antara 6.000 sampai 10.000 perempuan menjadi korban kekerasan. Selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2005, ada sekitar 532 kasus dari perkosaan yang dilaporkan ke polisi. Total 5408 kasus perkosaan

baik itu yang sudah terjadi maupun percobaan dilaporkan terjadi dari periode tahun 1997 hingga tahun 2006. Kurang lebih 15% dari laporan kasus perkosaan yang diterima polisi dari tahun 1997 hingga tahun 2005 menjadikan kasus perkosaan sebagai laporan utama korban. Sebanyak 88% kasus perkosaan yang tidak dilanjutkan proses hukumnya adalah karena tidak ada bukti yang cukup (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008). Hal inilah yang membuat kasus kekerasan menjadi tidak berkurang, bukti yang tidak cukup menjadikan kasus perkosaan yang dilaporkan seseorang menjadi tindakan “non-kejahatan” sehingga banyak keputusan meningkat untuk membatalkan tuntutan di pengadilan.

Selain itu, tidak ada pelayanan yang memuaskan terhadap para korban kasus kekerasan seksual menjadikan kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah utama perempuan di Finlandia. Pada umumnya di Finlandia pasangan perempuan sesama jenis yang masih terbilang tabu menerima perlakuan yang lebih tidak adil. Mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu menjadi korban dari kejahatan, kebencian maupun pengucilan dari masyarakat (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008). Padahal di hukum pidana Finlandia belum ada konsep kejahatan “kebencian” sehingga para korban terus mendapatkan penekanan dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Sebagai tambahan, segala bentuk perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga haruslah berlaku pada perempuan imigran dan perempuan cacat di Finlandia. Hal ini tidak terbantahkan mengingat kelompok minoritas tersebut juga membutuhkan kebutuhan khusus dan

kesulitan tertentu dalam membantu masalah mereka yang berhubungan dengan kekerasan. Tindakan untuk menuntut pemerintah membuat peraturan dan hukum yang tegas atas kekerasan yang dialami perempuan Finlandia ini menjadi salah satu hal yang sangat diserukan oleh gerakan perempuan di negara ini.

b) Perdagangan Perempuan dan Prostitusi

Bersamaan dengan kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia dan juga eksploitasi seksual (prostitusi) yang dialami oleh perempuan dan gadis-gadis merupakan salah satu masalah penting yang terjadi di Finlandia. Prostitusi dan perdagangan manusia merupakan masalah yang sulit untuk dihilangkan dari negara ini. Kesenjangan standar kehidupan yang besar di Eropa terletak di perbatasan antara Finlandia di satu sisi dan Rusia serta negara-negara Baltik di sisi lainnya. Hal ini menjadikan perdagangan perempuan dan prostitusi merupakan hal yang biasa terjadi di Finlandia dan memerlukan kewajiban dari pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dan cepat dalam melawan masalah ini (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

Walaupun prostitusi dan perdagangan perempuan sudah menjadi isu yang sering dibahas di Finlandia, sayangnya kedua hal ini masih tidak dianggap sebagai hal yang harus diselesaikan. Terlihat dari administrasi pemerintah negara yang sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan untuk bertanggung jawab terhadap kedua masalah ini. Hal ini kemudian juga

menjadi ironi dikarenakan Finlandia termasuk salah satu negara yang berpartisipasi dalam perjanjian yang menuntut adanya perlindungan terhadap korban prostitusi dan perdagangan perempuan (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008). Ditambah dengan terhubungnya jaringan prostitusi dan jaringan perdagangan perempuan di Finlandia semakin membuat susahny masalah ini untuk diselesaikan.

c) *Stereotyping* (Stigma Negatif) di Media dan Periklanan

Stigma negatif yang muncul di media dan periklanan berdampak pada perempuan-perempuan, utamanya gadis-gadis di Finlandia. Media dan periklanan berkembang menjadi hal yang lebih menampilkan unsur pornografi dan berfokus pada penampilan luar. Hal ini berdampak negatif, terutama pada gadis-gadis di Finlandia dikarenakan gambaran (*image*) yang muncul di media memberikan gambaran tentang pentingnya kecantikan, diet, kelangsingan, dan lain-lainnya. Hal ini dapat membawa terhadap kesalahpandangan perempuan dalam melihat dirinya. Media menjadi salah satu alasan di belakang tumbuhnya cara makan yang tidak teratur (*eating disorders*) di antara perempuan-perempuan Finlandia.

Selain itu pula, survei di Finlandia menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak menderita depresi dibandingkan dengan anak laki-laki. Sebanyak 18% dari anak perempuan di sekolah tingkat kedua dan 14% di sekolah tingkat ketiga pernah menderita depresi. Fakta yang lebih menyedihkan adalah bahwa Finlandia pernah menjadi negara kedua dengan tingkat bunuh diri di

antara anak-anak perempuan tertinggi di dunia (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008). Sedikit banyak media berpengaruh terhadap pembentukan karakter seorang anak.

d) Ketidakadilan Kelompok Minoritas

Perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tertentu menerima diskriminasi ganda di Finlandia. Diskriminasi tidak hanya diterima berdasarkan masalah gender dan jenis kelamin mereka yang perempuan, akan tetapi mereka juga harus berhadapan dengan masalah hak umum mereka yang diabaikan karena mereka tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas di Finlandia. Kelompok-kelompok minoritas tersebut di antaranya adalah kelompok tradisional seperti Roma dan Sani, juga para perempuan imigran serta perempuan cacat.

(1) Roma

Perempuan di Kelompok Roma merupakan perempuan yang menerima diskriminasi ganda karena mereka adalah perempuan dan juga karena latar belakang etnis mereka. Kelompok ini sudah didiskriminasi sejak lama baik itu di masyarakat luas Finlandia maupun di kalangan komunitas Roma sendiri. Dalam laporan pemerintah, walaupun perempuan dalam kelompok ini sudah mendapatkan perlakuan yang lebih baik, namun mereka masih menerima diskriminasi di tempat kerja, terutama di sektor swasta. Prasangka buruk terhadap perempuan Roma juga masih kuat. Perempuan Roma yang masih memakai pakaian adat dan akses ke tempat

publik masih merupakan hal yang didiskriminasi oleh masyarakat Finlandia (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

(2) Sami

Perempuan Sami adalah perempuan-perempuan asli pribumi (*indigenous people*) yang menjaga tradisi dan budaya Finlandia. Karena tradisi yang dijaga dan juga karena pengalaman diskriminasi yang pernah dialami, perempuan-perempuan ini tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan juga tidak menginginkan posisi atas di komunitas lokal maupun dalam masyarakat Finlandia. Pembelajaran tentang kehidupan sosial, politik, aktivitas organisasi, maupun kehidupan pekerjaan tidak pernah memasukkan materi tentang perspektif gender (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

(3) Perempuan Imigran

Sama halnya dengan perempuan asli pribumi di Finlandia, hal yang masih menjadi masalah bagi perempuan imigran di Finlandia adalah akses untuk bekerja. Pekerjaan merupakan faktor yang menentukan kehidupan seseorang di Finlandia. Perempuan imigran juga menerima perlakuan pembatasan berdasarkan tradisi gender yang membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan tetap. Banyak terdapat perempuan imigran yang terpelajar di Finlandia, akan tetapi keterampilan dan pengetahuannya hampir tidak diketahui di masyarakat Finlandia.

Selain itu, para perempuan imigran ini menjumpai adanya kekerasan sebagai ketidakadilan yang mereka terima. Masalah *honour-related* merupakan masalah utama yang dihadapi oleh perempuan imigran. Masalah *honour-related* merupakan masalah kompleks di mana terdapat dominasi laki-laki di tengah benturan dua lingkungan dan budaya. Dalam hal ini, perempuan imigran menerima ketidakadilan karena perempuan ini dianggap sudah menyalahi nilai penting dari komunitas mereka yang selanjutnya dianggap merusak kehormatan keluarga.

(4) Perempuan Cacat

Perempuan cacat juga menerima ketidakadilan di Finlandia. Ketidakadilan gender sudah dialami oleh perempuan Finlandia sejak lama dikarenakan kondisi mereka yang berbeda. Di Finlandia terdapat organisasi yang menangani perempuan cacat. Organisasi untuk perempuan cacat mementingkan perluasan tentang akses bagi perempuan cacat. Akses ini meliputi akses kesehatan, transportasi, dan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam aspek-aspek lainnya di Finlandia.

Faktanya, perempuan cacat menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tiga kali lebih banyak daripada perempuan biasa. Organisasi ini juga menekankan bahwa cacat bukanlah merupakan suatu penyakit dan bahwa perempuan cacat juga mempunyai hak yang sama dengan perempuan lainnya seperti hak untuk menerima perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

4. Bidang Pendidikan

a) Ketidakadilan dalam Pendidikan

Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Namun, semakin berkembangnya pendidikan tidak didasari dengan perimbangan dalam hal kurikulum. Keadilan gender merupakan hal yang harus mendapat perhatian sejak dini dan itu berarti sekolah memainkan peran penting dalam menumbuhkan jiwa yang adil gender bagi anak-anak. Selain itu, jumlah perempuan yang menduduki bangku pendidikan di Finlandia juga pernah mengalami perbedaan, di mana laki-laki pernah mendominasi (Sahlberg, 2009). Hal inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan dari gerakan perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di level pendidikan dan mengajarkan pemahaman keadilan gender sejak dini.

5. Bidang Kesehatan

a) Kurangnya Perhatian Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

Kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak pernah menjadi masalah ketidakadilan gender di Finlandia di mana mereka yang tinggal di perkotaan lebih mudah mendapatkan akses daripada mereka yang hidup di pedesaan. Ketidakadilan juga dirasakan ketika masyarakat kalangan kelas atas dapat membayar pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat kalangan kelas bawah, terutama perempuan dan anak-anak. Ketidakadilan yang terjadi di Finlandia ini setidaknya masih berlangsung hingga akhir abad ke-20 (Saaritsa, 2015).

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa ketidakadilan gender di Finlandia sudah muncul dan berlangsung sejak sebelum kemerdekaan hingga beberapa ketidakadilan masih berlangsung saat ini. Fakta-fakta munculnya ketidakadilan gender inilah yang kemudian diperjuangkan oleh gerakan perempuan Finlandia untuk kemudian dijadikan tuntutan ke pemerintah demi melawan dan menghapus ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat.